BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 84 TAHUN 2016

T E N T A N G
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : *a.* bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu diatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Satandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten dilingkungan pemerintah kabupaten bener meriah sebagai pengguna anggaran/barang;
6. Biaya adalah jumlah pengeluaran yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun akan terjadi;
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan;
8. Standar adalah suatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga);
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
10. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
12. Standar satuan harga dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah harga satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar tidak dapat melebihi;
13. Harga satuan pokok kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga satuan dalam bentuk kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan;

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
Pasal 2

(1) Standar biaya masukan tahun anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2017 yang berbasis kinerja;

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi; atau
b. Estimasi.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati Bener ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 29 Agustus 2016 M
26 Dzulkaidah 1437 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 30 Agustus 2016 M
27 Dzulkaidah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 84

LAMPIRAN 1 - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016 M
26 DZULQAIDAH 1437 H

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN BENER MERIAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	1.1 Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran			
	Nilai pagu dana s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	1,050,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,300,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2,300,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,700,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,300,000	
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,300,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,800,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,100,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,000,000	
	1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 100 juta s.d 200 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu di atas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	1,000,000	
	1.4 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	950,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,400,000	
	1.5 Bendahara Pengeluaran			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,050,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,400,000	
	1.6 Staf Pengelola Penguji Tagihan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	950,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,150,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,300,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
2.	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA**			
	2.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680,000	
	2.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,750,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	2,100,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2,750,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,100,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,500,000	
	2.3 Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,350,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,900,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2,200,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,800,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,200,000	
	2.4 Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultan s.d Rp. 50 juta	Orang/Kegiatan	400,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultan 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Kegiatan	450,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Kegiatan	480,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	600,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	700,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,050,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1,750,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1,950,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,200,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,250,000	
3.	**PENGGUNA ANGGARAN**			
	3.1 Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)			
	Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3,580,000	
	3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3,230,000	
	3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar	Orang/Paket	1,510,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/Paket	1,750,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 50 milyar s.d 100 milyar	Orang/Paket	1,990,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya diatas 100 milyar	Orang/Paket	2,230,000	
4.	**HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**			
	4.1 Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa	Orang/Kegiatan	420,000	
	4.2 Panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	1,800,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,100,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
5.	**HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (PDBP)**			
	5.1 Atasan Langsung Bendahara			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,800,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2,100,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,350,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,100,000	
	5.2 Bendahara Penerimaan			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,900,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,200,000	
	5.3 Petugas Penerimaan Daerah Bukan Pajak atau Anggota			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,100,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,400,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,600,000	
6	**HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG DAERAH**			
	6.1 Pengurus Barang	Orang/Bulan	400,000	
	6.2 pembantu pengurus barang	Orang/Bulan	300,000	
7	**HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN**			
	7.1 Pembantu penelitian/perekayasaan	Orang jam	25,000	
	7.2 Koordinator penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	400,000	
	7.3 Sekretariat penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	300,000	
	7.4 Pengolah data penelitian/perekayasaan	Peneliti/Perekayasa	1,500,000	
	7.5 Petugas survey penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	700,000	
	7.6 Pembantu lapangan penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	750,000	
8	**HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	8.1 Honorarium Narasumber/Pembahas			
	Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang/jam	1,400,000	
	Pejabat Eselon II yang disetarakan	Orang/jam	1,000,000	
	Pejabat Eselon III kebawah	Orang/jam	900,000	
	8.2 Moderator	Orang/jam	700,000	
9	**HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	9.1 Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	450,000	
	9.2 Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	9.3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	9.4 Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
10	**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI**			
	10.1 SLTA	Orang/Bulan	1,900,000	
	10.2 Sarjana Muda	Orang/Bulan	2,100,000	
	10.3 Sarjana Muda (S1)	Orang/Bulan	2,300,000	
	10.4 Master (S2)	Orang/Bulan	2,500,000	
	Bantuan Biaya Operasional Penyulu			
	10.4 Wilayah Kecamatan Non Terpencil	0rang/Bulan	300,000	
	10.5 Wilayah Kecamatan Terpencil	Orang/Bulan	400,000	
11	**HONORARIUM ROHANIWAN**	Orang/Bulan	400,000	
12	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	12.1 Untuk kegiatan bersifat isendentil atau masa kegiatan s/d 1 bln atau satu kali kegiatan			
	Pengarah	Orang/Keg	750,000	
	Penanggungjawab	Orang/Keg	700,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Ketua	Orang/Keg	650,000	
	Wakil Ketua	Orang/Keg	600,000	
	Sekretaris	Orang/Keg	500,000	
	Anggota	Orang/Keg	500,000	
	12.2 Untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan			
	Pengarah	Orang/Bulan	500,000	
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450,000	
	Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	Anggota	Orang/Bulan	300,000	
	12.3 Sekretariat Panitia pelaksana kegiatan			
	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	450,000	
13	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL**			
	13.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	450,000	
	13.2 Redaktur	Orang/Terbit	350,000	
	13.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	275,000	
	13.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	150,000	
	13.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150,000	
	13.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150,000	
14	**HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH**			
	14.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
	14.2 Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
	14.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	250,000	
	14.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	180,000	
	14.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150,000	
	14.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150,000	
15	**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**			
	15.1 Penanggung jawab	Orang/Bulan	500,000	
	15.2 Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	15.3 Editor	Orang/Bulan	400,000	
	15.4 Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
	15.5 Web Developer	Orang/Bulan	300,000	
	15.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Bulan	100,000	
	15.6 Penerjemah	Orang/Bulan	100,000	
16	**VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**			
	16.1 Pendidikan Dasar			
	Penyususn /pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelaj	150,000	
	Pengawas Ujian	OH	240,000	
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	5,000	
	16.2 Pendidikan Menengah			
	Penyususn /pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelaj	170,000	
	Pengawas Ujian	OH	270,000	
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	7,500	
	16.3 Pendidikan Tinggi			
	Diploma I, II, III, IV dan Strata 1 (S1)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	10,000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	150,000	
	Strata 2 (S2)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	15,000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	250,000	
	Strata 3 (S3)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	20,000	
	- Penguji Disertasi	Mhs/Mata ujian	350,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
17	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PIDATO**			
	17.1 Pembina	Orang/Kegiatan	500,000	
	17.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	475,000	
	17.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400,000	
	17.3 Ketua	Orang/Kegiatan	300,000	
	17.4 Sekretaris	Orang/Kegiatan	250,000	
	17.5 Anggota	Orang/Kegiatan	200,000	
18	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PRESS RELEASE PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**			
	18.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800,000	
	18.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775,000	
	18.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750,000	
	18.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700,000	
	18.4 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650,000	
	18.5 Anggota	Orang/Kegiatan	500,000	
19	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR			
	19.1 Golongan I dan II	Orang/Kali	200,000	
	19.2 Golongan III	Orang/Kali	300,000	
	19.3 Golongan IV	Orang/Kali	400,000	
20	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO**			
	20.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800,000	
	20.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775,000	
	20.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750,000	
	20.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700,000	
	20.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650,000	
	20.6 Anggota	Orang/Kegiatan	500,000	
21	**HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIKLAT dan BIMTEK**			
	21.1 Penceramah	OJP	1,000,000	
	21.2 Pengajar dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300,000	
	21.3 Pengajar dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200,000	
	21.4 Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000	
	21.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama diklat s.d 5 hari			
	Penanggung jawab	OK	450,000	
	Ketua/Wakil ketua	OK	400,000	
	Sekretaris	OK	350,000	
	Anggota	OK	300,000	
	b.Lama diklat 6 s.d 30 har			
	Penanggung jawab	OK	675,000	
	Ketua/Wakil ketua	OK	600,000	
	Sekretaris	OK	450,000	
	Anggota	OK	400,000	
	c.Lama diklat lebih dari 30 hari			
	Penanggung jawab	OK	900,000	
	Ketua/Wakil ketua	OK	800,000	
	Sekretaris	OK	600,000	
	Anggota	OK	600,000	
	21.6 Honorarium Pengawas Ujian Calon ASN	Orang/Hari	100,000	
22	**SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**			
	22.1 Golongan I dan II	Orang/Hari	25,000	
	22.2 Golongan III	Orang/Hari	27,000	
	22.3 Golongan IV	Orang/Hari	29,000	
23	**SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR**	Orang/Kali	200,000	
24	**HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**	Orang/Bulan	1,750,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5

25	**KELOMPOK HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/BARANG**					
	25.1 **Bendahara PPK /PPKD :**					
		No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		1	PPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	7,000,000	
		2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	4,000,000	
		3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-DPKK)	Orang/Bulan	3,000,000	
		4	Penguji Tagihan /Petugas VerivikasiSKPK	Orang/Bulan	2,500,000	
		5	Pembantu Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	1,500,000	
		6	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	1,500,000	
		7	Bendahara Penerimaan	Orang/Bulan	1,500,000	
		8	Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKKD	Orang/Bulan	1,000,000	
		9	Pembantu Bendahara Penerimaan DPKKD	Orang/Bulan	1,000,000	
	25.2 **Pengurus/penyimpanan Barang SKPK**					
		No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		1	Ketua /WAkil ketua pengelola barang daerah	Orang/bulan	4.000.000	
		2	Staf Pengelola barang daerah	Orang/bulan	3.000.000	
		1	Pengurus Barang pada SKPK			
			- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	500,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	700,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	1,000,000	
		2	Penyimpan Barang pada SKPK			
			- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	500,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	700,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	1,000,000	
		3	Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang pada SKPK			
			- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	400,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	600,000	
			- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	800,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
26	**Kelompok Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Penceramah/Pemateri/Peserta pada Kegiatan Pendidikan/Pelatihan/Seminar,Orentasi/Workshop/Diskusi dan sejeninya**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi Dalam Daerah	Orang/jam	1,400,000	Pjb Eselon I/yg disetarakan
		Orang/jam	1,000,000	Pjb Eselon II/yg disetarakan
		Orang/jam	900,000	Pjb Eselon III ke bawah yang disetarakan
	2 Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi Luar Daerah	Pertatap Muka	4,800,000	
	3 Pakar/ahli/profesional khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu yang diundang khusus dari :			
	a. Dalam Daerah	Pertatap Muka	3,000,000	
	b. Luar Daerah	Pertatap Muka	6,000,000	
	4*) - Moderator	Orang/jam	200,000	
	- Pembawa Acara / MC	Pertatap Muka	300,000	
	- Notulis	Pertatap Muka	400,000	
	- Pembaca Al-Qur'an	Pertatap Muka	200,000	
	- Pembaca Do'a	Pertatap Muka	200,000	
	- Pemimpin Lagu	Pertatap Muka	200,000	
	5. Uang saku peserta lokakarya/seminar/pelatihan/bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya	Orang/Hari	150,000	
	Keterangan :			
	1. Poin 1 minimal 1 jam pelajaran (45 menit), diberikan berdasarkan jenjang pendidikan/keahlian			
	2. Poin 2 dan 3b belum termasuk biaya transportasi			
	3. Poin 4 khusus moderator minimal 1 jam pelajaran (45 menit) maksimal 4 jam pelajaran/hari			
	*4. *) Jika dirangkap, hanya berhak atas satu honor yang menguntungkan*			
27	**Kelompok Staf Khusus/Penasehat dan Tim Asistensi/Tim Kerja MPTPTGR/Tenaga Ahli/Tim Advokasi /Tim Analisis dan Kajian Investasi .**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Honorarium tenaga ahli (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah	Orang/Bulan	3,000,000	
	2 Honorarium tim advokasi/komisi ahli dan Tim MPTPGR dan Tim Analisis/ Kajian Investasi (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah			
	- Pengarah	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2,700,000	
	- Ketua	Orang/Bulan	2,400,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,100,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	1,800,000	
	- Anggota sesuai kebutuhan rasional	Orang/Bulan	1,500,000	
	3 Honorarium tim advokasi/komisi ahli (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah			
	a. Staf khusus	Orang/Bulan	6,500,000	
	b. Penasehat khusus	Orang/Bulan	5,000,000	
	c. Tim asistensi/tim kerja Bupati/Wakil Bupati			
	- Ketua	Orang/Bulan	4,000,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	3,500,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	3,000,000	
	- Anggota Sesuai kebutuhan yang rasional	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Staf administrasi	Orang/Bulan	1,500,000	
	4 Honorarium narasumber pra rancangan/rancangan qanun	Orang/Pra/Raqan	4,000,000	
	5 Honorarium tim Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (SIMDA)			
	- Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	1,750,000	
	- Koordinator admin	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Anggota	orang/bulan	1,250,000	
	6 Honorarium konsultan pendamping impelementasi dan integrasi aplikasi SIMDA			
	- Ketua	Orang/Bulan	8,000,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	7,000,000	
	7 Jasa Pengamanan POLRI			
	Ketua/Anggota	Orang/Bulan	2,000,000	
	Keterangan :			
	1. Poin 4 dan 6 diluar transportasi dan akomodasi bagi narasumber/konsultan luar daerah			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
28	**Kelompok Honorarium Tenaga Kontrak dan Nama lainnya untuk Non PNS dan Uang Makan ADC. Non PNS**			

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	Tenaga administrator/operator komputer/tenaga kontrak/tenaga satpam/pengaman kantor/cleaning service dan nama lainnya.	Orang/Bulan	1,850,000	
2	Honor Dokter umum/dokter gigi/setara	Orang/Bulan	2,500,000	
3	Honorarium ADC non PNSD Bupati	Orang/Bulan	2,000,000	
4	Honorarium tambahan khusus non PNS dalam rangka kelancaran tugas pimpinan.	Orang/Bulan		
	a. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,500,000	
	b. ADC Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	2,500,000	
	c. ADC Sekda	Orang/Bulan	2,000,000	
	d. Dokter Pribadi Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,000,000	
	e. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekda	Orang/Bulan	2,000,000	
	f. Sopir Isteri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekda	Orang/Bulan	1,500,000	
	f. Pengamanan tertutup/melekat Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	1,500,000	
	g. Voreijder Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1,500,000	
	h. Sopir/ADC (Staf ahli Bupati/Asisten/Kepala SKPK	Orang/Bulan	1,000,000	
5	Uang makan ADC, Sopir, Voreijder Pamtup Bupati/Wakil Bupati/Isteri Bupati/wakil Bupati	Orang/Makan	20,000	
6.	Honorarium petugas razia Satpol PP/WH	Orang/Kegiatan	132,000	
	Keterangan :			
1.	Untuk poin 1 sudah termasuk uang makan			
2.	Untuk poin 2 dianggarkan pada Belanja Langsung (Honorarium non PNS)			
3.	Untuk poin 4.h Staf ahli tidak menggunakan ADC			

29 Kelompok Tim/Panitia/Pengelola WEB (PNS, Non PNS dari Dalam dan Luar Negeri)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	Yang bersifat insindentil/Temporer :*)			
	a. Pengarah Panitia	Orang/Bulan	900,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	850,000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	800,000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	750,000	
	e. Wakil ketua	Orang/Bulan	700,000	
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	600,000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	500,000	
2	Yang bersifat simultan/terus menerus (PNS/Non PNS) dari dalam dan luar daerah			
	a. Pengarah Panitia	Orang/Bulan	700,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	650,000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	600,000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	e. Wakil ketua	Orang/Bulan	500,000	
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	450,000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
	Keterangan :			
*)	Untuk priode 3 bulan atau 1 kali kegiatan insidentil dibayarkan sesuai kolom 4 perbulan atau perkegiatan			
*)	Periode 6 Bulan masing-masing ditambah Rp. 100.000,- dari kolom 4 perbulan			
*)	Periode 9 Bulan masing-masing ditambah Rp. 200.000,- dari kolom 4 perbulan			

30 Kelompok Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	a. Yang bersifat insindentil			
	- Pengarah pembina	Orang/Kali	2,000,000	
	- Penanggungjawab	Orang/Kali	1,800,000	
	- Koordinator	Orang/Kali	1,700,000	
	- Ketua	Orang/Kali	1,600,000	
	- Wakil ketua	Orang/Kali	1,500,000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	1,400,000	
	- Anggota	Orang/Kali	1,200,000	
	b. Yang bersifat simultan/terus menerus			
	- Pengarah pembina	Orang/Bulan	850,000	
	- Penanggungjawab	Orang/Bulan	800,000	
	- Koordinator	Orang/Bulan	750,000	
	- Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	- Wakil ketua	Orang/Bulan	600,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	650,000	
	- Anggota		500,000	
2	Yang bersifat perorangan/konsultan/lembaga pada suatu organisasi atau kelompok (PNS/Non PNS) dari dalam dan luar	Per Paket		
	Keterangan :			
	Untuk poin nomor 2 tarif paket ditetapkan sesuai sifat/bentuk penelitian yang rasional			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
36	**KEBUTUHAN PENGELUARAN UNTUK PELATIHAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Metode Harga Satuan			
	a. Akomodasi	Orang/Hari	450,000	
	b. Konsumsi (makan pagi, siang, malam dan 2x snack)	Orang/Hari	130,000	
	c. Sewa Tempat dan Peralatan (at cost)	Kegiatan	at cost	
	2 Metode Paket/ Full Board			
	a. Akomodasi, Konsumsi, Ruangan/Hall (twin)	Orang/Hari	500,000	
	b. Akomodasi, Konsumsi, Ruangan/Hall (single)	Orang/Hari	800,000	
37	**Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan,Tim Penyusun Dan Monev Anggaran/ TAPK dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kab.**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah	OB	3,000,000	
	2 Penanggungjawab	OB	2,750,000	
	3 Ketua	OB	2,500,000	
	4 Sekretaris	OB	2,250,000	
	5 Anggota	OB	2,000,000	
38	**HONORARIUM PADA PROGRAM DAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah			
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	1,600,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	1,300,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	1,100,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	1,000,000	
	b. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 s.d 50 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	2,400,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	1,900,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	1,600,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	900,000	
	c. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 50 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	3,700,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	2,900,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	2,400,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	1,000,000	
	2 Tim Kajian			
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	1,100,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	800,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	750,000	
39	**HONORARIUM TIM EVALUASI RAN.QANUN, PERBUP TENTANGAPBK DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBK PERENCANAAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Tim Asistensi Evaluasi APBD			
	a. Pengarah	OB	2,000,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1,950,000	
	c. Koordinator	OB	1,850,000	
	d. Ketua	OB	1,750,000	
	e. Sekretaris	OB	1,650,000	
	f. Anggota	OB	1,500,000	
40	**HONORARIUM TIM EVALUASI RANCANGAN/KLARIFIKASI/TINDAKLANJUT HASIL KLARIFIKASI DAN EVALUASI QANUN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah/Penanggungjawab/Ketua/Sekretaris	OB		
	2 Wakil Sekretaris	OB	700,000	
	3 Anggota	OB	600,000	
41	**Honorarium Sekretariat Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan,Tim Penyusun Dan Monev Anggaran /TAPK dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kab.**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 PNS			
	a. Anggota	OB	2,000,000	
	b. Operator Komputer	OB	900,000	

NO			URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1			2	3	4	5
		2	NON PNS			
			Operator Komputer	OB	700,000	
42	HONORARIUM PADA PROGRAM BIDANG HUKUM					
	42.1	HONORARIUM PENELITIAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH				
		No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
		1	2	3	4	5
		1	Pengarah	OB	1,700,000	
		2	Penanggungjawab	OB	1,600,000	
		3	Ketua	OB	1,500,000	
		4	Sekretaris	OB	1,400,000	
		5	Wakil Sekretaris	OB	1,300,000	
		6	Anggota	OB	1,200,000	
	42.2	HONORARIUM PENASEHAT HUKUM DAN TIM PENASEHAT HUKUM				
		No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
		1	2	3	4	5
		1	Penasehat Hukum pada Bidang Hukum	OB	2,000,000	
		2	Tim Penasehat Hukum	OB	2,000,000	
	42.3	HONORARIUM TIM ASISTENSI PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN				
		No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
		1	2	3	4	5
		1	Pengarah	OB	3,000,000	
		2	Penanggungjawab	OB	2,750,000	
		3	Ketua	OB	2,500,000	
		4	Sekretaris	OB	2,300,000	
		5	Wakil Sekretaris	OB	2,200,000	
		6	Anggota	OB	2,000,000	
43	HONORARIUM JASA PELATIH					
		No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
		1	2	3	4	5
		a	PASKIBRAKA			
			1. Koordinator	Paket	3,500,000	
			2. Pelatih	Paket	3,000,000	
			3. Asisten Pelatih	Paket	1,750,000	
			4. Peserta	Paket	1,500,000	
		b	PELATIH OLAHRAGA			
			1. Pelatih Internasional	OB	25,000,000	
			2. Pelatih Nasional	OB	15,000,000	
			3. Pelatih Daerah	OB	5,000,000	
			4. Asisten Pelatih	OB	2,500,000	
			5. Instruktur	OB	2,000,000	
			6. Konsultan Pelatih	OB	10,000,000	
			7. Uang Saku Atlet	OB	3,000,000	
44	BONUS ATLET					
		No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
		1	2	3	4	5
		1	PON			
			- Emas Perorangan	Paket	200,000,000	
			- Perak Perorangan	Paket	75,000,000	
			- Perunggu Perorangan	Paket	25,000,000	
			- Emas Beregu	Paket	300,000,000	
			- Perak Beregu	Paket	200,000,000	
			- Perunggu Beregu	Paket	100,000,000	
		2	PORWIL/ PRAPON			
			- Emas Perorangan	Paket	10,000,000	
			- Perak Perorangan	Paket	7,500,000	
			- Perunggu Perorangan	Paket	5,000,000	
			- Emas Beregu	Paket	25,000,000	
			- Perak Beregu	Paket	15,000,000	
			- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
		3	KEJURNAS			
			- Emas Perorangan	Paket	10,000,000	
			- Perak Perorangan	Paket	7,500,000	
			- Perunggu Perorangan	Paket	5,000,000	
			- Emas Beregu	Paket	15,000,000	
			- Perak Beregu	Paket	7,500,000	
			- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
		4	POPNAS/POPWIL/KEJURNAS PELAJAR/POMNAS/POMWIL/KEJURNAS MAHASISWA/PARALYMPIC			
			- Emas Perorangan	Paket	5,000,000	
			- Perak Perorangan	Paket	3,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	- Perunggu Perorangan	Paket	1,500,000	
	- Emas Beregu	Paket	10,000,000	
	- Perak Beregu	Paket	7,500,000	
	- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
45	**TUNJANGAN PRESTASI KERJA/BEBAN KERJA**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	I PEJABAT STRUKTURAL			
	1. Eselon III.a	OB	1.500.000	
	2. Eselon III.b	OB	1.300.000	
	3. Eselon IV.a	OB	1.000.000	
	4. Eselon IV.b	OB	900,000	
	5. Eselon V.a	OB	700,000	
	II PEJABAT TERTENTU LAINNYA			
	1. Sekretaris Daerah	OB	12,000,000	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	OB	8,000,000	
	3. Kepala Dinas/ Badan	OB	4,000,000	
	4. Staf Ahli	0B	3.500.000	
	5 Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	OB	3,000,000	
	6. Pejabat Pengelola Keuangan Selaku BUD	OB	8,000,000	
	7. Kuasa Bendahara Umum Daearh	OB	5,000,000	
	8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-DPKK	OB	4,000,000	
	9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1,500,000	
	10.Kabag di Lingkungan Setadakab	0B	2.000.000	
	9. Sekretaris BAPPEDA	OB	2,500,000	
	10.Kabid BAPPEDA/ DPKK	OB	1,750,000	
	11 - Adc. Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK	OB	850,000	
	- Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	OB	850,000	
	- Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	OB	850,000	
	13. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)			
	a. PPK Sekretaris/ Badan/ Dinas (Eselon III.a)	OB	1,100,000	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	OB	800,000	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	OB	700,000	
	14. Pembantu PPK Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Insfektorat/ Kantor Camat			
	a. Golongan III	OB	600,000	
	b. Golongan II	OB	500,000	
	c. Golongan I	OB	400,000	
	15. Bendahara Pengeluaran SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	650,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	16. Bendahara Pengeluaran DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	900,000	
	b. Golongan II	OB	750,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	17. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	750,000	
	b. Golongan II	OB	650,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	18. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK			
	a. Golongan III	OB	600,000	
	b. Golongan II	OB	500,000	
	c. Golongan I	OB	400,000	
	19. Bendahara Penerimaan SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	20. Bendahara Penerimaan DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	900,000	
	b. Golongan II	OB	750,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	21. Pembantu Bendahara Penerimaan DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	22. Bendahara Pembantu Dinas Pendikan			
	a. Golongan III	OB	450,000	
	b. Golongan II	OB	350,000	
	c. Golongan I	OB	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	23. Bendahara Barang SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	24. Kepala Ruangan Pada RSUD Bener Medriah	OB	500,000	
	25. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah			
	a. Kepala SMA/ SMK	OB	500,000	
	b. Wakil Kepala SMA/ SMK	OB	350,000	
	c. Kepala SMP	OB	450,000	
	d. Wakil Kepala SMP	OB	300,000	
	e. Kepala SD	OB	400,000	
	f. Kepala TK	OB	300,000	
	26. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/ Gigi)			
	a. Golongan IV	OB	1,000,000	
	b. Golongan III	OB	800,000	
	27. Tenaga Fungsional (Medis/ Paramedis)			
	a. Golongan IV	OB	400,000	
	b. Golongan III	OB	300,000	
	c. Golongan II	OB	250,000	
	28. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)			
	a. Auditor Ahli Madya	OB	1,000,000	
	b. Auditor Ahli Muda	OB	900,000	
	c. Auditor Ahli Pratama	OB	800,000	
	d. Auditor Trampil Pelaksana	OB	600,000	
	29. Fungsional (Guru/ Pendidik)			
	a. Golongan IV	OB	250,000	
	b. Golongan III	OB	200,000	
	c. Golongan II	OB	150,000	
	30. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	
	31. Tenaga Fungsional Lainnya			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	
	31. Tenaga Administrasi/ Staf			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	
	d. Golongan I	OB	250,000	
III	PEJABAT BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (DAERAH TERPENCIL DAN TEMPAT TUGAS TERTENTU LAINNYA)			
	1. Pejabat Eselon III Kepala SKPK	OB	3,500,000	
	1. Pejabat Eselon IV Kepala SKPK dan Pejabat Eselon III Berdasarkan Tempat Tugas Tertentu	OB	2,000,000	
	3. Eselon IIIb	OB	1,500,000	
	3. Eselon IVa	OB	1,200,000	
	4. Eselon IVb	OB	1,500,000	
	5. Tenaga Administrasi	OB		
	a. Golongan IV	OB	950,000	
	b. Golongan III	OB	850,000	
	c. Golongan II	OB	750,000	
	d. Golongan I	OB	700,000	
	6. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	OB		
	a. Golongan IV	OB	850,000	
	b. Golongan III	OB	750,000	
	c. Golongan II	0B	700,000	
46	**HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
	a. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
	b. Bantuan PKL	Orang Kegiatan	1,500,000	Dalam Daerah
2	DIKLAT PIM Tk.III			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
	c. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	150,000	
	d. Bantuan PKL			
	- Dalam Daerah	Orang Kegiatan	2,000,000	
	- Luar Daerah	Orang Kegiatan	3,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	3 DIKLAT PIM Tk.II			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	400,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	6,000,000	
	4 DIKLAT PIM Tk.I			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	450,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	8,000,000	
	5 LEMHANAS			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	600,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	10,000,000	
	Keterangan			
	*) Sesuai Indeks Biaya Yang Ditentukan			
47	**BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL**			

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL			
2	a. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
3	b. Pengadaan Sertifikasi	Lembar	100,000	

48	**BIAYA DIKLAT TEKNIS/DIKLAT FUNGSIONAL (LUAR DAERAH), DAN LUAR NEGERI DENGAN DURASI WAKTU 5 HARI ATAU LEBIH**			

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Penyelenggara			
	a. SPPD selama 2 hari (PP)			*)
	b. Biaya Kontribusi			**)
	c. Bantuan Uang Saku, Transfortasi Lokal, Uang Buku, dll (hari 3 dan seterusnya) :			
	1. GOL. IV			
	- Luar Daerah	Orang Hari	350,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	700,000	
	2. GOL. III			
	- Luar Daerah	Orang Hari	250,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	600,000	
	3. GOL. II			
	- Luar Daerah	Orang Hari	200,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	500,000	
2	Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Penyelenggara	Orang Hari		
	a. SPPD selama 8 hari (PP)			*)
	b. Biaya Kontribusi			**)
	c Penyelenggaraan Diklat > 8 Hari			***)
	d. Bantuan Uang Saku, Transfortasi Lokal, Uang Buku, dll (hari ke 9 s.d hari ke 15) :			
	1. GOL. IV			
	- Luar Daerah	Orang Hari	700,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,500,000	Penginapan Dibayar At Cost Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas
	2. GOL. III			
	- Luar Daerah	Orang Hari	600,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,200,000	
	3. GOL. II			
	- Luar Daerah	Orang Hari	500,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,000,000	
	Keterangan :			
	*) Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas			
	**) Sesuai Penetapan Lembaga Diklat			
	***) 1 s.d 8 hari diberi SPPD Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas			
49	**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS MENGIKUTI TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR DILINGKUNGAN KABUPATEN**			

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1	TUGAS BELAJAR			
	A. Luar Daerah *)			
	1. Strata-3 (Non Eksakta)	5x Termin	55,000,000	
	2. Strata-3 (Eksakta)	5x Termin	65,000,000	*) Penyesuaian Berdasarkan Evaluasi dan Kebutuhan Dasar
	3. Strata-2 (Non Eksakta)	2x Termin	60,000,000	
	4. Strata-2 (Eksakta)	2x Termin	55,000,000	
	B. Dalam Daerah			
	1. Strata-2 (Non Eksakta)	2x Termin	40,000,000	
	2. Strata-2 (Eksakta)	2x Termin	35,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	C. Dokter Spesiallis			
	1. PPDS-1 (Universitas Indonesia)	5x Termin	65,000,000	
	2. PPDS-1 (Luar Daerah)	5x Termin	60,000,000	
	1. PPDS-1 (Dalam Daerah)	5x Termin	45,000,000	
	D. Luar Negeri (Asia Tenggara)			
	1. Strata-2	3x Termin	90,000,000	
	E. Bantuan Untuk Kerjasama Antar Lembaga			
	Dalam Daerah			
	1. Strata-2 (Non Eksakta)	2x Termin	30,000,000	
	2. Strata-2 (Eksakta)	2x Termin	30,000,000	
2	IZIN BELAJAR			
	1. Strata-2	2x Termin	10,000,000	
	1. Strata-3	5x Termin	15,000,000	
50	**SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN DIKLAT/DIKLAT PRAJABATAN/DIKLAT DLM JABATAN PADA BKPP**			
No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Makan Peserta Diklat	OH	65,000	3 Kali Sehari
2	Snack Peserta Diklat	OH	20,000	2 Kali Sehari
3	Makan/Snack Peserta Diklat dlm rangka Observasi Lapangan	OH	200,000	
4	Tas Kegiatan terdiri dari Ballpoint, Badge Nama, Buku Tulis, Dan Isi Lainnya	OK	250,000	
51	**HONORARIUM TIM INSTRUKTUR SENAM KESEJAHTERAAN JASMANI**			
No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Instruktur Senam	OB	1,200,000	
52	**HONORARIUM TIM PEMERIKSA/PENELITI ADM PENGADAAN BARANG DAN JASA**			
No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Petugas Pemeriksa/Peneliti Adm Pengadaan Barang dan Jasa	OB	1,000,000	
53	**HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**			
No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Pengarah	OB	2,700,000	
2	Penanggung Jawab	OB	2,600,000	
3	Ketua/ Admin PPE	OB	2,500,000	
4	Sekretaris	OB	2,000,000	
5	Admin Agency/Admin Sistem/Trainer/Verifikator/Helpdesk	OB	1,750,000	
dst	Staf Sekretariat	OB	700,000	
54	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000	
2	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730,000	
3	Printer	Unit/Tahun	690,000	
4	AC Plit	Unit/Tahun	610,000	
5	Genset Lebih Kecil Dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000	
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	

55 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

55,1 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sekali Jalan)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI (Rp.)
1	Aceh	175,000
2	Sumatera Utara	232,000
3	Riau	175,000
4	Kepulauan Riau	120,000
5	Jambi	120,000
6	Sumatera Barat	190,000
7	Sumatera Selatan	125,000
8	Lampung	145,000
9	Bengkulu	94,000
10	Bangka Belitung	900,000
11	Banten	305,000
12	Jawa Barat	200,000
13	DKI Jakarta	250,000
14	Jawa Tengah	200,000
15	D.I Yogyakarta	94,000
16	Jawa Timur	150,000
17	Bali	150,000
18	Nusa Tenggara Barat	213,000
19	Nusa Tenggara Timur	84,000
20	Kalimantan Barat	105,000
21	Kalimantan Tengah	90,000
22	Kalimantan Selatan	105,000
23	Kalimantan Timur	80,000
24	Sulawesi Utara	129,000
25	Gorontalo	200,000
26	Sulawesi Barat	217,000
27	Sulawesi Selatan	141,000
28	Sulawesi Tengah	75,000
29	Sulawesi Tenggara	135,000
30	Maluku	201,000
31	Maluku Utara	174,000
32	Papua	355,000
33	Irian Jaya Barat	145,000

55.2 Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (Pergi - Pulang)

(dalam rupiah)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1	Bener Meriah	Medan		611,000
2	Bener Meriah	Banda Aceh		555,000
3	Banda Aceh	Jakarta	7,519,000	4,991,000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12,739,000	7,498,000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8,225,000	5,288,000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10,792,000	6,691,000
7	Banda Aceh	Batam	10,439,000	6,595,000
8	Banda Aceh	Biak	18,718,000	11,231,000
9	Banda Aceh	Kendari	11,110,000	7,377,000
10	Banda Aceh	Malang	10,204,000	7,820,000
11	Banda Aceh	Mataram	10,846,000	6,940,000
12	Banda Aceh	Medan	3,466,000	2,436,000
13	Banda Aceh	Palangka Raya	10,546,000	6,691,000
14	Banda Aceh	Kendari	12,953,000	7,820,000
15	Banda Aceh	Denpasar	10,835,000	6,976,000
16	Banda Aceh	Jayapura	19,167,000	11,907,000
17	Banda Aceh	Jogjakarta	9,765,000	5,977,000
18	Banda Aceh	Makassar	12,760,000	7,534,000
19	Banda Aceh	Manado	15,798,000	8,806,000
20	Banda Aceh	Pontianak	9,990,000	6,488,000
21	Banda Aceh	Semarang	9,530,000	5,894,000
22	Banda Aceh	Solo	9,530,000	6,048,000
23	Banda Aceh	Surabaya	10,985,000	6,382,000
24	Banda Aceh	Timika	18,504,000	11,195,000
25	Medan	Jakarta	7,252,000	4,231,000
26	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,867,000
27	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,912,000
28	Jakarta	Gorontalo	7,231,000	5,360,000
29	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,555,000
30	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,645,000
31	Jakarta	Mamuju	7,295,000	5,407,000
32	Jakarta	Manokwari	16,223,000	12,026,000
33	Jakarta	Padang	5,530,000	3,280,000
34	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,520,000
35	Jakarta	Palu	9,348,000	5,681,000
36	Jakarta	Pangkal Pinang	3,412,000	2,376,000
37	Jakarta	Pekan Baru	5,583,000	3,351,000
38	Jakarta	Ternate	10,001,000	7,404,000

55.3 Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Untuk Pejabat Bupati /wakil Bupati

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG MAKAN DAN MINUM	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	600,000	550,000	400,000
2	Dalam Wilayah Sumatera Diluar Aceh	OH	600,000	600,000	500,000
3	Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera	OH	600,000	700,000	600,000
4	Kabupaten Aceh Tengah	OH	600,000	500,000	300,000
5	Dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah	OH	450,000	400,000	250,000

Untuk Pejabat Eselon dan Non Eselon

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG MAKAN DAN MINUM	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	375,000	350,000	250,000
2	Dalam Wilayah Sumatera Diluar Aceh	OH	375,000	400,000	250,000
3	Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera	OH	375,000	400,000	300,000
4	Kabupaten Aceh Tengah	OH	200,000	100,000	100,000
5	Dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah	OH	180,000	100,000	100,000

55.3 Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Untuk Pejabat Bupati /wakil Bupati

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG MAKAN DAN MINUM	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	600,000	550,000	400,000
2	Dalam Wilayah Sumatera Diluar Aceh	OH	600,000	600,000	500,000
3	Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera	OH	600,000	700,000	600,000
4	Kabupaten Aceh Tengah	OH	600,000	500,000	300,000
5	Dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah	OH	450,000	400,000	250,000

Untuk Pejabat Eselon dan Non Eselon

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG MAKAN DAN MINUM	UANG SAKU	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	375,000	350,000	250,000
2	Dalam Wilayah Sumatera Diluar Aceh	OH	375,000	400,000	250,000
3	Luar Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera	OH	375,000	400,000	300,000
4	Kabupaten Aceh Tengah	OH	200,000	100,000	100,000
5	Dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah	OH	180,000	100,000	100,000

55.4 Satuan Biaya uang harian perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Permenkeu R.I Nomor 33/PMK.02/2016

55.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6		6
1	Aceh	OH	4,420,000	1,625,000	1,063,000	546,000	546,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,500,000	879,000	505,000	505,000
3	Riau	OH	3,817,000	1,200,000	868,000	450,000	437,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,011,000	1,300,000	650,000	502,000	322,000
5	Jambi	OH	4,705,000	1,211,000	740,000	382,000	333,500
6	Sumatera Barat	OH	4,988,000	1,160,000	529,000	477,000	425,500
7	Sumatera Selatan	OH	5,505,000	1,250,000	591,100	514,000	322,000
8	Lampung	OH	4,658,888	1,300,000	700,000	400,000	360,000
9	Bengkulu	OH	1,529,000	929,000	688,850	599,000	586,500
10	Bangka Belitung	OH	3,362,000	1,352,000	612,950	533,000	349,600
11	Banten	OH	4,480,000	1,682,000	639,400	797,000	460,000
12	Jawa Barat	OH	4,310,000	1,760,000	800,000	515,000	460,000
13	DKI Jakarta	OH	4,376,000	1,490,000	870,500	610,000	460,000
14	Jawa Tengah	OH	4,877,000	1,708,000	517,500	497,000	402,500
15	D.I Yogyakarta	OH	5,435,000	1,468,000	607,200	629,000	445,050
16	Jawa Timur	OH	5,176,000	1,598,000	557,750	499,000	328,900
17	Bali	OH	5,742,000	2,129,000	1,039,600	904,000	756,700
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4,034,000	1,437,000	621,000	540,000	414,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,529,000	1,176,000	632,500	662,000	460,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,823,000	1,329,000	494,500	430,000	379,500
21	Kalimantan Tengah	OH	3,529,000	1,877,000	534,750	558,000	501,400
22	Kalimantan Selatan	OH	5,000,000	1,885,000	575,000	500,000	435,850
23	Kalimantan Timur	OH	4,705,000	1,715,000	632,500	550,000	517,500
24	Kalimantan Utara	OH	4,705,000	1,715,000	632,500	550,000	517,500
25	Sulawesi Utara	OH	3,764,000	1,827,000	575,000	549,000	333,500
26	Gorontalo	OH	1,552,000	1,188,000	471,500	423,000	276,000
27	Sulawesi Barat	OH	1,482,000	1,211,000	460,000	425,000	414,000
28	Sulawesi Selatan	OH	5,670,000	1,335,000	619,850	539,000	431,250
29	Sulawesi Tengah	OH	2,388,000	1,523,000	460,000	493,000	379,500
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,176,000	1,258,000	517,500	488,000	483,000
31	Maluku	OH	3,529,000	1,211,000	556,600	545,000	322,000
32	Maluku Utara	OH	3,658,000	1,778,000	483,000	478,000	437,000
33	Papua	OH	3,352,000	1,792,000	529,000	460,000	476,100
34	Papua Barat	OH	3,235,000	1,743,000	460,000	798,000	425,500

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
56	**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN**			
	58.1 Angkutan setempat, uang saku, uang makan	Orang/Hari	350,000	
57	**SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL**			
	57.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkt	30,261,000	
	57.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkt	22,125,000	
	57.3 Diklat Pimpinan Tk. IIV	Peserta/Angkt	20,230,000	
58	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**			
	58.1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkt	4,470,000	
	58.2 Golongan III	Peserta/Angkt	5,545,000	
59	**SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**			
	59.1 Dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000	
	59.2 Dari bahasa Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000	
	- Strata 3 dan Specialis 2	Orang/Tahun	2,250,000	
60	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS/ BANGUNAN**			
	60.1 Pejabat			
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	41,900,000	
	b. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40,000,000	
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39,850,000	
	60.2 Operasional			
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	34,620,000	
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	37,640,000	
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3,930,000	
	d. Kend. Dinas Ops Patroli Jalan Raya PJR Roda Empat	Unit/Tahun	78,370,000	
	e. Kend. Dinas Ops Patroli Jalan Raya PJR Roda dua	Unit/Tahun	19,680,000	
	60.3 a. Biaya pemeliharaan Gedung bertingkat	m 2/Tahun	170,000	
	b. Biaya pemeliharaan Gedung bertingkat	m 2/Tahun	131,000	
	c. Hbiaya pemeliharaan alaman Gedung/Bangunan Kantor	m 2/Tahun	10,000	
61	**SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**	Per Hari	6,800,000	
62	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL PEJABAT**	Unit	651,800,000	
	a. Pejabat Eselon I	Unit	702,970,000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit	515,263,000	
63	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA EMPAT**			
	66.1.1 Pick Up	Unit	192,200,000	
	66.1.2 Minibus	Unit	284,550,000	
	66.1.3 Double Gardan	Unit	437,850,000	
64	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA DUA**			
	67.2.1 Operasional	Unit	18,800,000	
	67.1.2 Lapangan	Unit	31,000,000	
65.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS**			
	68.1 Pakaian Kerja Dokter	Stel	610,000	
	68.2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	460,000	
	68.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Stel	400,000	
	68.4 Pakaian kerja sopir / pesuruh	Stel	460,000	
	68.5 Pakaian Kerja Satpam	Stel	980,000	

67. BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	32,000	27,000
2	Sumatera Utara	OH	32,000	27,000
3	Riau	OH	32,000	27,000
4	Kepulauan Riau	OH	32,000	27,000
5	Jambi	OH	32,000	27,000
6	Sumatera Barat	OH	32,000	27,000
7	Sumatera Selatan	OH	32,000	27,000
8	Lampung	OH	32,000	27,000
9	Bengkulu	OH	32,000	27,000
10	Bangka Belitung	OH	32,000	27,000
11	Banten	OH	30,000	25,000
12	Jawa Barat	OH	30,000	25,000
13	DKI Jakarta	OH	30,000	25,000
14	Jawa Tengah	OH	30,000	25,000
15	D.I Yogyakarta	OH	30,000	25,000
16	Jawa Timur	OH	30,000	25,000
17	Bali	OH	38,000	32,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	38,000	32,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	38,000	32,000
20	Kalimantan Barat	OH	36,000	30,000
21	Kalimantan Tengah	OH	36,000	30,000
22	Kalimantan Selatan	OH	36,000	30,000
23	Kalimantan Timur	OH	36,000	30,000
24	Kalimantan Utara	OH	36,000	30,000
25	Sulawesi Utara	OH	36,000	30,000
26	Gorontalo	OH	36,000	30,000
27	Sulawesi Barat	OH	36,000	30,000
28	Sulawesi Selatan	OH	36,000	30,000
29	Sulawesi Tengah	OH	36,000	30,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	36,000	30,000
31	Maluku	OH	38,000	32,000
32	Maluku Utara	OH	38,000	32,000
33	Papua	OH	44,000	37,000
34	Papua Barat	OH	44,000	37,000

68 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

68.1 Pejabat Eselon I dan II

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	236,000	400,000	1,008,000
2	Sumatera Utara	204,000	328,000	800,000
3	Riau	190,000	280,000	640,000
4	Kepulauan Riau	227,000	321,000	693,000
5	Jambi	190,000	290,000	740,000
6	Sumatera Barat	173,000	235,000	820,000
7	Sumatera Selatan	254,000	337,000	710,000
8	Lampung	228,000	280,000	754,000
9	Bengkulu	190,000	280,000	770,000
10	Bangka Belitung	287,000	390,000	901,000
11	Banten	280,000	340,000	820,000
12	Jawa Barat	300,000	408,000	921,000
13	DKI Jakarta	280,000	400,000	740,000
14	Jawa Tengah	209,000	280,000	740,000
15	D.I Yogyakarta	245,000	405,000	743,000
16	Jawa Timur	250,000	344,000	722,000
17	Bali	350,000	490,000	1,640,000
18	Nusa Tenggara Barat	327,000	517,000	785,000
19	Nusa Tenggara Timur	230,000	350,000	740,000
20	Kalimantan Barat	200,000	250,000	621,000
21	Kalimantan Tengah	217,000	368,500	720,000
22	Kalimantan Selatan	200,000	335,000	930,000
23	Kalimantan Timur	295,000	401,000	763,000
24	Kalimantan Utara	295,000	401,000	763,000
25	Sulawesi Utara	228,000	347,000	790,000
26	Gorontalo	190,000	270,000	830,000
27	Sulawesi Barat	210,000	320,000	690,000
28	Sulawesi Selatan	206,000	355,000	1,000,000
29	Sulawesi Tengah	224,000	320,000	810,000
30	Sulawesi Tenggara	210,000	380,000	785,000
31	Maluku	246,000	340,000	815,000
32	Maluku Utara	287,000	456,000	829,000
33	Papua	276,000	336,000	870,000
34	Papua Barat	230,000	340,000	802,000

68.2 Pejabat Eselon III ke Bawah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	198,000	300,000	650,000
2	Sumatera Utara	172,000	275,000	540,000
3	Riau	139,000	185,000	505,000
4	Kepulauan Riau	140,000	240,000	620,400
5	Jambi	183,000	282,000	546,000
6	Sumatera Barat	145,000	220,000	522,000
7	Sumatera Selatan	215,000	259,000	614,000
8	Lampung	167,000	236,000	640,000
9	Bengkulu	180,000	220,000	705,000
10	Bangka Belitung	261,000	297,000	600,000
11	Banten	208,000	290,000	655,000
12	Jawa Barat	219,000	274,000	703,000
13	DKI Jakarta	230,000	330,000	630,000
14	Jawa Tengah	150,000	210,000	540,000
15	D.I Yogyakarta	209,000	307,000	540,000
16	Jawa Timur	200,000	329,000	543,000
17	Bali	230,000	395,000	1,000,000

19	Nusa Tenggara Timur	185,000	305,000	520,000
20	Kalimantan Barat	186,000	224,000	558,000
21	Kalimantan Tengah	209,000	336,000	576,000
22	Kalimantan Selatan	175,000	295,000	759,000
23	Kalimantan Timur	200,000	335,000	615,000
24	Kalimantan Utara	200,000	335,000	615,000
25	Sulawesi Utara	159,000	240,000	665,000
26	Gorontalo	172,000	235,000	755,000
27	Sulawesi Barat	160,000	280,000	465,000
28	Sulawesi Selatan	180,000	310,000	825,000
29	Sulawesi Tengah	180,000	251,000	550,000
30	Sulawesi Tenggara	186,000	277,000	550,000
31	Maluku	150,000	288,000	563,000
32	Maluku Utara	132,000	180,000	535,000
33	Papua	178,200	327,000	748,000
34	Papua Barat	205,000	305,000	550,000

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs.RUSLI M. SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 84 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016 M
26 DZULKAIDAH 1437 H

PENJELASAN
LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja , diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1 Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA .Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.

1.2 Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan satuan kerja , KPA dapat menunjuk PPABP , Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelola..

1.3 Ketentuan jumlah staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut :

a. Jumlah SPK yang membantu KPA:

a.1. KPA yang merangkap sebagai PPK , jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang , termasuk PPABP

a.2. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.

b. Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari Jumlah PPK. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

c. Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut :

c.1. Jumlah SPK tidak boleh melampui sebelum penggabungan,

c.2. Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK

c.3. Dalam hal penggabungan SPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya , maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.

2. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang.

Catatan:

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

2.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi Barang

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

2.4 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

3. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal melakukan penetapan seleksi/pemenang atas pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa non barang/konstruksi/jasa lainnya.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PDBP. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah petugas penerima PDBP paling banyak 5 (lima) orang.
b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan PDBP setiap satuan kerja.
c. Dalam hal **bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium tersebut.**

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Daerah

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksan tugas rutin selaku pengurus / penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan **honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.**

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (nonfungsional peneliti) diberikan kepada Pegawai Negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian melebihi jam kerja normal atau diluar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari.

8. Hononorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan

Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Droup Discussion /Kegiatan sejenis yang dilaksanakan tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan

Catatan :

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 menit baik dilakukan secara panel maupun individual
- Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

  Narasumber /pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara dan atau narasumber/pembahas berasal dari unit organisasi tersebut sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/ masyarakat

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada pegawai ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Droup Discussion /Kegiatan sejenis yang dilaksanakan tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan

Catatan :

- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

  Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara dan atau moderator berasal dari unit organisasi tersebut sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/ masyarakat

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada pegawai ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Droup Discussion /Kegiatan sejenis yang dihadiri peserta minimal 200 orang .

9. Hononorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasil dan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eseion I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. **Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta . Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 maka jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.**

10. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

Bantuan Biaya Opersional Penyuluh

Biaya operasional penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan baiaya bantuan teransportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagai dimaksud pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006.

11. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan

sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, dan kegiatan lainnya. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

12. Honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPK/KPA

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain
c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diperioritaskan.
d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil disamping tugas pokok sehari-hari
e) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim Pelaksana .

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur kesekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

14. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusun buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara priodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

15. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Eselon II.

16. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi/honoraraium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

17. Honorarium Tim Penyusunan Pidato

Honorarium tim penyusun pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menghimpun pidato berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pidato yang dimaksud disini adalah pidato Kepala Daerah.

18. Honorarium Tim Penyusunan Press Release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Honorarium tim penyusun press release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk peliputan kegiatan Bupati dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

19. Uang Saku Rapat di dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja . Dengan ketentuan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catata.

a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk kansumsi rapat
b. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
c. Dari peserta dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transportasi .

20. Honorarium Tim Penyusun Berita Radio

Honorarium tim penyusun berita radio dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun berita radio berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Berita radio yang dimaksud disini adalah berita daerah yang disiarkan melalui radio .

21. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat dan Bimtek

21.1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Daera/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklatpada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :

a. Berasal dari luar organisasi penyelenggara
b. Berasal dari dalam organisasi dan peserta berasal dari luar organisasi penyelenggara
c. Khusus untuk Pegawai ASN ,Honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya disyahkan oleh Pejabat Eselon IIke atas /setara.

21.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

21.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka, ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

21.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat berwenang. Dengan ketentuan;

a. Bagi Widyaiswara , honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib Widyaiswara sesuai ketentuan berlaku.
b. Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20 % .

21.4. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia yang menyelenggarakan diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan :

a. Merupakan tugas tambahan / perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.

c. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % dari jumlah pewserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan , jika peserta kurang dari 40 maka jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang.

22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

23. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.
Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

a. melibatkan peserta dari pejabat eselon/masyarakat;
b. dilaksanakan minimal 4 jam kerja;
c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
f. surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan

Catatan:

a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
   Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat

24. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service diperuntukan bagi nonpegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.

25. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang

Honorarium yang diberikan kepada : PPKD selaku bendahara umum daerah, Kuasa bendahara umum daerah, Pejabat penatausahaan keuangan , Pejabat Penguji Tagihan Bendahara/ Pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran PPKD .

Honorarium pengurus dan penyimpan barang terdiri dari : Honorarium yang diberikan kepada personil Pengelola Barang Daerah dan Personil Pengguna barang pada SKPK.

26. Honorarium Kelompok Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber / Penceramah / Pemateri / Peserta pada Kegiatan Pendidikan / Pelatihan / Seminar, Orentasi / Workshop / Diskusi dan sejeninya.

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya / masyarakat dalam Kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

27. Honorarium Kelompok Staf Khusus/Penasehat dan Tim Asistensi/Tim Kerja MPTPGR/Tenaga Ahli/Tim Advokasi dan Tim Kajian dan Analisis Investasi.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

28. Honorarium Tenaga Kontrak dan Nama lainnya untuk Non ASN dan Uang Makan ADC. Non ASN..

Honorarium dan Uang Makan yang hanya diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Tenaga Kontrak dan Adc .

29. Honorarium Kelompok Tim/Panitia/Pengelola WEB (Pegawai ASN, Non ASN dari Dalam dan Luar Negeri).

Honorarium Tim Panitia/Pengelola WEBSITE dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

30. Honorarium Kelompok Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian.

Honorarium Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

31. Tim Penulis/Penyusun Pidato/Makalah/Persentase Bupati dan Sekretaris Daerah

Honorarium Tim Penulis/Penyusun Pidato/Makalah/Persentase Bupati dan Sekretaris Daerah dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

32. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten Bener Meriah. Yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari.

33. Honorarium Tim Pembuat WEB SITE

Honorarium Tim Pembuat WEBSITE dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang beri tugas untuk membuat Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

34. Satuan Biaya Uang Lembur, Biaya Makan Lembur Dan Biaya Makan Kegiatan (Pegawai ASN dan Non PASN).

a. Uang lembur.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin instansi / lembaga , Satpam, Pengemudi, Petugas kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur.

Diperuntukan bagi pegawai aparatur sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin instansi / lembaga , Satpam, Pengemudi, Petugas kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

35. Paket Perlengkapan Peralatan/ Atribut Pelatihan Per Peserta

Satuan Paket Perlengkapan Peralatan/ Atribut Pelatihan Per Peserta merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Pelatihan kepada PNS / Non PNS dan Masyarakat.

36. Kebutuhan Pengeluaran Untuk Pelatihan

Satuan Kebutuhan Pengeluaran untuk Pelatihan merupakan satuan biaya untuk kebutuhan Pelatihan meliputi Konsumsi, Akomodasi dan Sewa Tempat Pelatihan.

37. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan, Tim Penyusun Anggaran dan Tim Monitoring Anggaran / TAPK dan Tim Penyusun Laporan Keuangan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu

tugas Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan, Menyusun Anggaran Kabupaten dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Anggaran SKPK dan Membahas RKA/DPA-SKPK dan Menyusun Laporan Keuangan SKPK .

38. **Honorarium Pada Program dan Kegiatan Pengadaan Tanah**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

39. **Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Tentang APBK dan Tim Evaluasi Dokumen Perencanaan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas Mengevaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Tentang APBK dan Tim Evaluasi Dokumen Perencanaan.

40. **Honorarium Tim Evaluasi Rancangan/Klarifikasi/Tindaklanjut Hasil Klarifikasi Dan Evaluasi Qanun.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas Mengevaluasi Rancangan/Klarifikasi/Tindaklanjut Hasil Klarifikasi Dan Evaluasi Qanun.

41. **Honorarium Sekretariat Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan, Tim Penyusun Anggaran dan Tim Monitoring Anggaran / TAPK dan Tim Penyusun Laporan Keuangan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim Sekretariat pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas membantu Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan, Tim Penyusun Anggaran Kabupaten dan Tim Evaluasi dan Monitoring Anggaran SKPK dan Tim Pembahas RKA/DPA-SKPK dan Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPK .

42. **Honorarium Program pada Bidang Hukum**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas penerbitan Produk Hukum meliputi SK, Peraturan Kepala Daerah dan Qanun.

43. **Honorarium Jasa Pelatih**

Honorarium Jasa Pelatih dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih masyarakat agar terampil.

44. **Bonus Atlet**

Bonus Atlet merupakan kompensasi kepada seluruh Atlet Cabang Olah Raga.

45. **Tunjangan Prestasi Kerja/ Beban Kerja**

Tunjangan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dihitung berdasarkan Tanggung Jawab, Beban Kerja dan Golongan Pegawai Aparatur Sipil Negara , Kelangkaan profesi dan tempat bertugas.

46. **Honorarium dan Satuan Biaya Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat ditunjuk untuk melaksanakan suatu tugas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diklat meliputi Biaya Pendidikan, Uang Saku dan Bantuan PKL.

47. **Biaya Diklat Teknis Fungsional**

Satuan Biaya Diklat Teknis Fungsional merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat Teknis Fungsional kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Pegawai ASN dan Masyarakat meliputi Uang Saku dan Pengadaan Sertifikasi.

48. Biaya Diklat Teknis/Diklat Fungsional (Luar Daerah), Dan Luar Negeri Dengan Durasi Waktu 5 Hari Atau Lebih.

Satuan Biaya Diklat Teknis Fungsional merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat Teknis Fungsional kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Pegawai ASN dan Masyarakat meliputi Biaya Akomodasi, Konsumsi, Uang Saku, Biaya Transportasi Lokal, Uang Buku dan Biaya Angkutan PP.

49. Satuan Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Tugas Belajar , Izin Belajar d an bantuan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) baik dalam dalam kabupaten maupun luar kabupaten Bener Meriah.

Satuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Tugas Belajar , Izin Belajar, Dilingkungan Kabupaten merupakan kompensasi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Pejabat Esselon I/KPA atau Nota Perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Lemaga Perguruan Tinggi.

50. Satuan Biaya Makan Dan Minum Kegiatan Diklat/Diklat Prajabatan/Diklat Dlm Jabatan Pada BKPP

Satuan Biaya Makan dan Minum merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat/Diklat Prajabatan/Diklat Dlm Jabatan Pada BKPP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara .

51. Honorarium Tim Instruktur Senam Kesejahteraan Jasmani

Honorarium Tim Instruktur Senam Kesejahteraan Jasmani dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih Senam Kesejahteraan Jasmani.

52. Honorarium Tim Pemeriksa/Peneliti Adm Pengadaan Barang Dan Jasa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas memproses kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

53. Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas memproses kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sarana elektronik.

54. Satuan Biaya Pemeliharaan Saran Kantor.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi), personal computer /notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal **, untuk pemeliharaan ginset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.**

55. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi

55.1 Biaya taksi Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil Negara/ Non ASN untuk membayar biaya taksi dari bandara ke tempat penginapan dan dari penginpan ke bandara.

55.2 Tiket bus umum, kapal laut, pesawat udara, disesuaikan dengan ongkos yang berlaku (biaya real/at cost) pada saat melakukan perjalanan dinas termasuk air port tax untuk perjalanan menggunakan pesawat udara.

55.3 Biaya uang harian dapat dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dinas dan Uang transportasi lokal hanya dibayarkan pada saat atau kapan sampai ketempat tujuan bukan lamanya perjalanan dinas.

55.4 Biaya penginapan tidak dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas tetapi dibayar selama waktu menginap ditempat tujuan dan atau ditempat transit dari dan ke Redelong. Uang penginapan dibayarkan menurut eselon bagi Pegawai yang bepergian keluar daerah tersebut dibayarkan tunai biaya real (at cost).

Biaya penginapan dibebankan sesuai dengan biaya real dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang berangkat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel tempat tujuan sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

55.5 Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
Golongan B : pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara.
Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan yang setara.
Golongan D : pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
Contoh:
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

56. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Daerah Terpencil Dalam Kabupaten

Adalah biaya yang dibayarkan untuk mengganti angkutan setempat, uang saku dan uang makan kepada ASN dan Non ASN jika melaksanakan perjalanan Dinas kedaerah terpencil dalam Kabupaten Bener Meriah. Dibayarkan secara Lump Sum.

Untuk ASN dan Non ASN, satuan biaya dapat diberikan sepanjang :

a. Tidak menggunakan kenderaan dinas.
b. Disertai surat tugas.
c. Tidak bersifat rutin.

57. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

58. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

59. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Adalah biaya yang dibayarkan untuk penerjemahan dan pengetikan dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing dan dari bahasa Asing ke Bahasa Indonesia

60. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dan Operasional Kenderaan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

61. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain yang sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

62. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon.

63. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Empat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

64. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

65. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
   Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.
b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat
   Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
   2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki izin prinsip dari Bupati.
c. Satuah Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
   Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh
   Satuan biaya pakaian kerja. sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

66. Satuan Biaya Sewa Kenderaan

Satuan biaya untuk sewa kenderaan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi, sewa kenderaan bukan lamanya suatu kegiatan tetapi sewa kenderaan tersebut berlaku saat melaksanakan perjalanan saja (dihitung dengan jadwal kegiatan dilapangan).

67. Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien rumah sakit, anak asuhan (panti), tuna sosial.

68. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselengarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M.SALEH